

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 688,85 km². Wilayah ini terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau, seperti pegunungan hijau, perbukitan, dan lahan pertanian yang sangat subur dan terbentang luas. Selain itu, keberadaan kawasan agrowisata semakin memperkuat daya tarik wilayah Magetan sebagai daerah yang kaya akan destinasi wisata yang potensial. Keindahan alam ini berpadu dengan potensi ekonomi berbasis agraris, menjadikan Kabupaten Magetan daerah yang kaya akan sumber daya alam sekaligus menarik bagi pengembangan sektor pariwisata. Tidak hanya itu, wilayah Magetan juga dikenal sebagai sentra produksi kerajinan kulit yang telah lama menjadi ikon kebanggaan masyarakat setempat dan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Wilayah administrasi Kabupaten Magetan terbagi menjadi 18 kecamatan, yang meliputi Barat, Bendo, Karangrejo, Karas, Kartoharjo, Kawedanan, Lembeyan, Magetan, Maospati, Ngariboyo, Nguntoronadi, Panekan, Parang, Plaosan, Poncol, Sidorejo, Sukomoro, dan Takeran (PPID Magetan, 2024). Sebaran 207 desa yang tersebar di pelosok daerah menciptakan keragaman karakteristik dan potensi lokal. Kecamatan-kecamatan ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan, baik dari segi ekonomi, sosial,

maupun budaya. Dengan keberagaman wilayahnya, Kabupaten Magetan mampu memadukan potensi pedesaan dan perkotaan secara seimbang.

Dengan jumlah penduduk 678.343 jiwa, menjadikan wilayah Kabupaten Magetan memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah yang berada di sekitar Kabupaten Magetan. Penduduk Magetan sebagian besar bermata pencaharian di sektor agraris, seperti Bertani, berkebun, dan peternakan. Lahan subur yang mendukung sektor pertanian ini menjadi sumber utama penghidupan masyarakat, sementara sektor industri kecil dan perdagangan mulai berkembang pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan pasar lokal dan regional. Keseimbangan antara sektor agraris dan industri kecil ini menjadikan wilayah Magetan daerah dengan struktur ekonomi yang beragam dan potensial untuk berkembang lebih maju.

Keindahan alam Kabupaten Magetan tidak hanya terlihat dari hamparan sawah dan kebun yang hijau, tetapi juga dari keberadaan destinasi wisata alam unggulan. Telaga Sarangan, yang terletak di lereng Gunung Lawu, menjadi salah satu ikon wisata yang paling terkenal. Dengan udara sejuk khas pegunungan dan panorama indah, Telaga Sarangan menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. Selain itu, wisata Air Terjun Tirtosari dan Gunung Blego juga menjadi tujuan favorit bagi para pecinta alam dan pendaki. Keberadaan wisata-wisata ini menjadi aset penting bagi pengembangan pariwisata wilayah Magetan.

Sektor industri kreatif juga mulai menunjukkan perkembangan di Kabupaten Magetan. Sentra kerajinan kulit khususnya di Kecamatan Magetan, telah lama dikenal sebagai penghasil produk berkualitas seperti tas, dompet,

sepatu, dan sandal. Produk-produk ini tidak hanya dipasarkan di dalam negeri tetapi juga telah menembus pasar internasional. Dengan inovasi dan pemasaran yang baik, industri ini berpotensi menjadi salah satu pilar ekonomi yang mengangkat nama Kabupaten Magetan di tingkat global. Dukungan dari pemerintah daerah dan kemitraan dengan pelaku usaha menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing industri ini.

Selain potensi ekonomi dan wisata, Kabupaten Magetan memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Tradisi lokal seperti upacara adat, seni tari, dan musik gamelan masih dilestarikan oleh masyarakat. Festival budaya yang rutin diadakan, seperti kirab budaya dan pementasan seni tradisional, menjadi ajang untuk mempromosikan identitas lokal sekaligus memperkuat rasa kebersamaan masyarakat. Keberagaman budaya dan tradisi masyarakat Kabupaten Magetan tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat lokal tetapi juga menjadi kekayaan tersendiri yang masih dijaga dengan baik hingga saat ini.

Sektor pendidikan di Kabupaten Magetan juga terus mengalami peningkatan. Berbagai sekolah dan lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, telah tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Magetan. Pemerintah daerah aktif mendorong program-program pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan generasi yang mampu memanfaatkan potensi daerah dengan baik, terutama di bidang agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Wilayah Kabupaten Magetan memiliki 27 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 31 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar di berbagai kecamatan. Lembaga-lembaga ini masih dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Dengan keberadaan SMA dan SMK yang tersebar di berbagai wilayah, Kabupaten Magetan mampu memberikan akses pendidikan yang cukup merata kepada generasi mudanya, sehingga setiap anak, terlepas dari lokasi tempat tinggalnya, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Dengan keberadaan SMA dan SMK yang tersebar di berbagai wilayah, Magetan mampu memberikan akses pendidikan yang cukup merata kepada generasi mudanya. SMA lebih berfokus pada pengembangan pendidikan akademik yang mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Mata pelajaran yang diajarkan mencakup berbagai bidang ilmu, seperti matematika, sains, bahasa, dan ilmu sosial, yang bertujuan memperkuat kemampuan analitis serta wawasan siswa. Sebagai pelengkap, SMA juga telah menerapkan program ekstrakurikuler yang bertujuan mengembangkan minat dan bakat siswa dalam seni, olahraga, dan teknologi. Hal ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara holistik.

Di sisi lain, SMK di Kabupaten Magetan memainkan peran strategis dalam mencetak tenaga kerja yang terampil dan siap menghadapi dunia kerja. Program keahlian yang ditawarkan di SMK sangat beragam, mulai dari teknik mesin, tata boga, hingga teknologi informasi. Keberadaan SMK memberikan

opsi menarik bagi siswa yang ingin langsung bekerja setelah menyelesaikan pendidikannya. Selain itu, beberapa SMK di wilayah Magetan juga telah menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri, sehingga siswa dapat mengikuti program magang atau yang dikenal sebagai PKL (Praktik Kerja Lapangan) guna untuk meningkatkan pengalaman praktis mereka.

Keberadaan SMA dan SMK yang beragam ini memberikan kontribusi signifikan dalam Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Magetan. Dengan kombinasi antara pendidikan akademik di SMA dan pelatihan vokasional di SMK, siswa memiliki kesempatan untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan potensi dan minat mereka. Langkah ini tidak hanya memperkaya wawasan generasi muda tetapi juga mendukung peningkatan ekonomi daerah melalui tenaga kerja yang berkualitas dan inovatif. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, pendidikan di wilayah Magetan diharapkan terus berkembang, menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mandiri dan produktif.

Kabupaten Magetan terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui berbagai program pembangunan, termasuk di bidang pendidikan. Sebagai daerah dengan potensi yang besar, baik dari segi sumber daya manusia maupun alam, Magetan memiliki peluang untuk berkembang lebih pesat di masa depan. Kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam mewujudkan wilayah Magetan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Dalam mendukung sektor pendidikan, Kabupaten Magetan mendapat alokasi berupa bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau biasa disebut

Dana BOS dari pemerintah pusat. Dana BOS ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dana ini sangat penting untuk membantu sekolah-sekolah memenuhi kebutuhan operasional yang tidak termasuk dalam belanja personalia.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendikbud, 2021). Dengan adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat, sekolah-sekolah di Kabupaten Magetan memiliki peluang untuk mengatasi berbagai keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh sekolah dan sering menjadi kendala utama dalam pengelolaan pendidikan.

Secara spesifik, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pengadaan alat tulis, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, perawatan fasilitas sekolah, hingga pelatihan guru. Semua ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa dan guru. Selain itu, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga berperan dalam mendukung program-program inovatif yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Magetan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung prestasi siswa serta guru.

Di Kabupaten Magetan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar pendidikan tetap dapat terpenuhi, sehingga siswa di daerah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Meskipun Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat krusial untuk mendukung pendidikan, seringkali dana tersebut disalahgunakan atau tidak digunakan dengan benar di lapangan. Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak tepat sasaran yang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, sehingga pelaksanaan dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Untuk memastikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan secara optimal, pengawasan yang ketat sangatlah diperlukan. Hal ini mencakup pengawasan administrasi dan pelaksanaan di lapangan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga menjadi langkah yang strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Dengan pengelolaan yang baik, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat benar-benar menjadi solusi atas berbagai keterbatasan pada sektor pendidikan, khususnya di wilayah Kabupaten Magetan.

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam memastikan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tepat adalah Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan. Cabang Dinas Pendidikan

Kabupaten Ponorogo-Magetan bertugas mengawasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan. Pengawasan ini tidak hanya tentang administrasi, tetapi juga termasuk pengawasan langsung terhadap penggunaan dana di lapangan. Selain itu, pengawasan ini memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pihak sekolah dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang transparan dan sesuai dengan peraturan.

Namun, meskipun pengawasan tersebut sangat penting, Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan juga menghadapi tantangan saat melakukan pengawasan. Beberapa masalah umum yang sering terjadi meliputi kurangnya tenaga kerja yang ahli di bidang keuangan, keterbatasan fasilitas untuk melakukan pemantauan langsung, dan kecenderungan untuk mengabaikan pengawasan teknis. Sebagai contoh, seringkali ditemukan sekolah-sekolah yang kurang paham dengan ketentuan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akibatnya, dana tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya dukungan teknologi dalam proses pengawasan. Dalam era digitalisasi saat ini, penggunaan sistem informasi berbasis teknologi seharusnya dapat membantu pengawasan menjadi lebih efektif. Namun kenyataannya, banyak sekolah maupun pengawas yang belum memiliki akses atau kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Hal ini menyebabkan proses pengawasan menjadi lambat dan kurang akurat.

Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait juga menjadi kendala yang signifikan. Sering kali, komunikasi antara Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan, sekolah-sekolah, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, informasi yang diperlukan untuk pengawasan tidak tersampaikan dengan cepat dan jelas, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pengawasan itu sendiri.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran operasional Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan yang optimal. Dengan anggaran yang terbatas, pengawasan lapangan sering kali tidak bisa dilakukan secara rutin. Padahal, pengawasan langsung di lapangan sangat penting untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pentingnya peran Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan dalam mengawasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini mendorong penelitian untuk lebih mendalami bagaimana pengawasan dilakukan, seberapa efektif pengawasan yang sudah dilaksanakan, dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh instansi terkait dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu instrumen penting dalam memperkuat sektor pendidikan di Kabupaten Magetan. Dengan pengelolaan yang baik, dana ini tidak hanya mampu mengatasi keterbatasan anggaran, tetapi juga menjadi katalisator untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan merata. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan bahwa tujuan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat tercapai secara optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo - Magetan dalam pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Magetan?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo - Magetan terhadap penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Magetan?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo - Magetan dalam melakukan pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Magetan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo - Magetan dalam pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Magetan.

2. Mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo - Magetan terhadap penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Magetan.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo - Magetan dalam melakukan pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan tentang pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), khususnya dalam konteks peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengawasannya. Dengan fokus pada instansi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana kebijakan pengawasan diterapkan secara langsung di tingkat lokal. Hasil dari penelitian ini tidak hanya dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan, tetapi juga menjadi referensi bagi akademisi yang tertarik untuk mendalami pengelolaan keuangan pendidikan di tingkat sekolah.

Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi praktis bagi upaya penguatan pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh instansi pemerintah daerah. Dengan memahami tantangan dan potensi yang ada, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang strategi

pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah terkait pendekatan yang lebih baik dalam membina dan mendampingi sekolah-sekolah, sehingga pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah

Dengan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan dalam melakukan pengawasan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-sekolah di wilayah Magetan.

Selain memberikan rekomendasi praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dalam pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan menyajikan data dan temuan yang relevan, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap kendala, tetapi juga proaktif dalam mencegah permasalahan serupa di masa depan. Pendekatan berbasis data ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekaligus memperkuat akuntabilitas di tingkat sekolah.

3. Sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan, dalam

merancang kebijakan yang lebih efektif terkait dengan pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Rekomendasi tersebut mencakup strategi penguatan koordinasi antara Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan dan sekolah SMA atau SMK Kabupaten Magetan, optimalisasi pelatihan bagi bendahara sekolah, serta pengembangan sistem pelaporan yang lebih efisien. Dengan adanya panduan berbasis hasil penelitian, pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam menghadapi tantangan yang ada dan memastikan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Cabang Dinas Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan utama dalam merancang program pelatihan atau *workshop* yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan. Program pelatihan tersebut dapat difokuskan pada aspek-aspek krusial seperti pengelolaan administrasi, analisis data keuangan, dan pemahaman regulasi terkait pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan merujuk pada hasil penelitian, materi pelatihan dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan tantangan spesifik

yang dihadapi oleh para pegawai, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan aplikatif.

Selain meningkatkan kompetensi teknis, program pelatihan atau *workshop* yang dirancang berdasarkan hasil penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan pegawai dalam mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat selama proses pengawasan. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, baik dari segi kualitas pemantauan maupun akuntabilitas pelaporannya. Dengan pegawai yang lebih kompeten, pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat sekolah dapat berjalan lebih optimal, sehingga mendukung terciptanya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan di wilayah Ponorogo - Magetan.

5. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Cabang Dinas Pendidikan dan pihak sekolah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai pentingnya komunikasi yang efektif antara Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan dan sekolah-sekolah di wilayah Magetan dalam pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Komunikasi yang intensif memungkinkan kedua pihak untuk saling berbagi informasi secara *real-time*, baik terkait prosedur, kendala teknis, maupun pembaruan kebijakan terbaru. Dengan komunikasi yang terbuka dan transparan, proses pengawasan dapat berjalan lebih lancar, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal

ini juga membantu meningkatkan pemahaman pihak sekolah terhadap tanggung jawab administratif dan teknis yang harus dipenuhi.

Selain komunikasi, penelitian ini juga menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antara Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo - Magetan dan sekolah-sekolah di wilayah Magetan. Koordinasi yang intensif, seperti melalui pertemuan rutin, pendampingan langsung, atau forum diskusi, dapat memperkuat hubungan kerja sama dan memastikan setiap sekolah mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Dengan koordinasi yang kuat, Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo - Magetan dapat lebih mudah memantau pelaksanaan program, memberikan bimbingan kepada bendahara sekolah, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara cepat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa komunikasi dan koordinasi yang harmonis menjadi pilar utama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Magetan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul dan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca.

1. Kabupaten Magetan

Kabupaten Magetan merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur yang terletak di ujung barat dengan luas wilayah mencapai 688,85 km². Wilayah ini memiliki beragam potensi, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Wilayah Magetan dikenal sebagai daerah yang subur dengan bentangan lahan pertanian yang luas, perbukitan hijau, dan panorama alam yang menakjubkan. Keindahan alamnya

menjadi daya tarik tersendiri, baik untuk sektor pariwisata maupun sebagai modal utama dalam pengembangan agribisnis. Selain itu, Kabupaten Magetan memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari 18 kecamatan dan 207 desa, dengan berbagai karakteristik lokal yang mencerminkan keragaman budaya dan sosial masyarakat setempat. Hal ini menjadikan wilayah Magetan sebagai daerah dengan potensi pembangunan yang seimbang antara kawasan pedesaan dan perkotaan.

2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya operasional pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana ini disalurkan untuk mendukung biaya operasional sekolah, yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, pembelian alat-alat pembelajaran, serta pembayaran honor guru dan tenaga pendidik non-PNS. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran pendidikan.

3. Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan

Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo - Magetan merupakan institusi yang bertugas mengelola dan mengawasi berbagai aspek pendidikan di Kabupaten Magetan dan Ponorogo, termasuk penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Peran utama instansi ini meliputi pemberian bimbingan teknis, pemantauan administrasi, serta pengawasan langsung ke sekolah-sekolah yang menerima dana tersebut. Selain itu, Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo – Magetan juga bertanggung jawab memastikan bahwa sekolah-sekolah memahami aturan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan menerapkannya secara akuntabel. Dalam pelaksanaannya, instansi ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sekolah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

4. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang diterima oleh sekolah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Mulyasa (2011) menyatakan bahwa pengawasan dalam konteks pendidikan harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Pengawasan yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo – Magetan

yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi di tingkat kabupaten/kota. Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo – Magetan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerjanya.

5. SMA dan SMK di Kabupaten Magetan

SMA dan SMK di Kabupaten Magetan memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia. SMA lebih berfokus pada pendidikan akademik dengan kurikulum yang mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Siswa diajarkan berbagai mata pelajaran yang memperkuat kemampuan analitis, wawasan umum, dan keterampilan berpikir kritis. Di sisi lain, SMK berperan sebagai lembaga pendidikan vokasional yang menyiapkan siswa untuk langsung terjun ke dunia kerja. Program-program keahlian yang ditawarkan meliputi berbagai bidang seperti teknik, tata boga, dan teknologi informasi, yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global. Dengan adanya SMA dan SMK yang tersebar di seluruh kecamatan, Magetan mampu memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakatnya.

F. Landasan Teori

1. Gambaran Umum Kabupaten Magetan

Kabupaten Magetan, yang terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 688,85 km², merupakan daerah yang dikenal akan keindahan alamnya. Keanekaragaman alam seperti pegunungan hijau, perbukitan, dan lahan pertanian subur yang membentang luas menjadikan

wilayah ini kaya akan sumber daya alam. Potensi ini diperkuat dengan adanya kawasan agrowisata yang menjadi daya tarik tambahan, sehingga Kabupaten Magetan memiliki peluang besar dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis agraris. Selain itu, daerah ini juga dikenal sebagai pusat kerajinan kulit yang menjadi ikon budaya dan ekonomi lokal. Produk-produk kerajinan kulit Magetan tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat setempat tetapi juga menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Secara administratif, Kabupaten Magetan terbagi menjadi 18 kecamatan, yaitu Barat, Bendo, Karangrejo, Karas, Kartoharjo, Kawedanan, Lembeyan, Magetan, Maospati, Ngariboyo, Nguntoronadi, Panekan, Parang, Plaosan, Poncol, Sidorejo, Sukomoro, dan Takeran (PPID Magetan, 2024). Kecamatan-kecamatan ini mencakup 207 desa yang tersebar di berbagai pelosok daerah, menciptakan keragaman karakteristik dan potensi lokal. Dengan memadukan potensi pedesaan dan perkotaan secara seimbang, wilayah-wilayah administrasi ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini menjadikan Kabupaten Magetan tidak hanya sebagai daerah dengan keindahan alam yang memukau tetapi juga sebagai wilayah dengan potensi ekonomi dan budaya yang besar untuk dikembangkan.

Dengan total penduduk mencapai 678.343 jiwa, Kabupaten Magetan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor agraris, meliputi aktivitas seperti bertani, berkebun, dan beternak. Dukungan dari lahan subur di wilayah ini menjadikan sektor pertanian sebagai

tulang punggung ekonomi masyarakat. Di sisi lain, sektor industri kecil dan perdagangan mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan, seiring meningkatnya kebutuhan pasar lokal maupun regional. Kombinasi antara sektor agraris yang kokoh dan pertumbuhan industri kecil menciptakan struktur ekonomi yang beragam, memberikan potensi besar bagi Kabupaten Magetan untuk berkembang lebih pesat di masa depan.

2. Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Keindahan alam Kabupaten Magetan tidak hanya terlihat dari hamparan sawah dan kebun yang hijau, tetapi juga melalui berbagai destinasi wisata alam yang menjadi daya tarik unggulan. Salah satu ikon wisata paling populer adalah Telaga Sarangan, yang terletak di lereng Gunung Lawu. Dengan udara sejuk khas pegunungan dan panorama alam yang memukau, Telaga Sarangan berhasil menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya. Selain itu, destinasi lain seperti Air Terjun Tirtosari dan Gunung Blego juga menjadi magnet bagi para pecinta alam dan pendaki. Keberadaan tempat-tempat wisata ini merupakan aset strategis yang mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Magetan.

Sektor industri kreatif di Kabupaten Magetan juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Menurut Erawati dan Kirwani bahwasannya pada industri pengolahan kulit yang menjadi hulu yaitu industri penyamakan kulit sedangkan industri hilirnya adalah industri kerajinan kulit. Dengan adanya keterkaitan antar industri tersebut secara umum diharapkan dapat mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan investasi dan secara khusus dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan

masyarakat. Sentra kerajinan kulit, terutama yang berpusat di Kecamatan Magetan, telah lama dikenal sebagai penghasil produk berkualitas tinggi seperti tas, dompet, sepatu, dan sandal. Produk-produk ini tidak hanya diminati di pasar domestik tetapi juga telah merambah pasar internasional. Dengan inovasi yang terus dikembangkan dan strategi pemasaran yang efektif, industri kerajinan kulit memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama perekonomian daerah. Dukungan pemerintah daerah serta kolaborasi dengan pelaku usaha lokal menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri ini.

3. Sektor Agraris di Kabupaten Magetan

Kabupaten Magetan memiliki wilayah agraris yang kaya dengan lahan subur yang cocok untuk berbagai jenis kegiatan agraris, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jenis-jenis pertanian yang dominan meliputi padi, jagung, dan sayuran, yang didukung oleh sistem irigasi teknis di beberapa kecamatan. Hasil analisis data pertanian di Kabupaten Magetan menunjukkan, sebesar 70% masyarakat Magetan bekerja pada sektor pertanian. Luas wilayah Magetan 68.885 ha, terbagi atas 28.269 ha tanah sawah dan 40.616 tanah kering. Luas panen padi pada tahun 2017 mencapai 53.438,9 hektar, terdiri dari 51.858,9 hektar padi sawah dan 1.580 hektar padi ladang (Nadziroh, 2020). Perkebunan, seperti tanaman tebu, kopi, dan cengkeh, berkembang di wilayah dengan ketinggian tertentu, terutama di daerah yang berbatasan dengan pegunungan. Selain itu, peternakan menjadi

aktivitas penting, dengan populasi sapi, kambing, dan unggas yang signifikan, mendukung kebutuhan pangan lokal sekaligus menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Potensi agraris ini memberikan peluang untuk mendukung swasembada pangan di tingkat lokal maupun regional.

Sektor agraris memainkan peran sentral dalam struktur ekonomi Kabupaten Magetan, dengan mayoritas penduduk menggantungkan hidup pada kegiatan agraris. Pertanian menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga, sementara peternakan dan perkebunan memberikan pendapatan tambahan. Kegiatan agraris juga menciptakan efek berantai pada sektor lain, seperti perdagangan hasil pertanian, pengolahan pangan, dan jasa transportasi. Sektor agraris mendukung ketahanan pangan lokal dan regional, khususnya di wilayah Jawa Timur. Industri pengolahan hasil pertanian, seperti pabrik penggilingan padi dan pembuatan produk olahan sayuran, mulai berkembang, memberikan nilai tambah ekonomi bagi hasil agraris.

Namun, dibalik ini semua pasti terdapat tantangan dalam pengembangan sektor agraris. Adapun tantangannya antara lain seperti, konversi lahan pertanian yang menjadi kawasan permukiman atau industri yang mengakibatkan kurangnya luas lahan produktif. Lalu perubahan pola curah hujan dan suhu menjadi ancaman bagi produksi pertanian dan peternakan. Selain itu, keterbatasan teknologi juga menjadi tantangan karena masih banyak petani yang menggunakan teknik tradisional, sehingga hasil produksi belum optimal.

Di lain sisi, juga terdapat peluang dalam pengembangan sektor agraris, seperti dukungan dari pemerintah yang melaksanakan program seperti

pelatihan teknologi pertanian modern, bantuan pupuk bersubsidi, dan pendanaan untuk usaha agraris dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu juga agrowisata yang menggabungkan sektor agraris dengan pariwisata, seperti wisata kebun dan peternakan, dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mempromosikan hasil lokal.

4. Pendidikan di Kabupaten Magetan

Pemerintah Kabupaten Magetan berupaya meningkatkan akses pendidikan melalui pemerataan distribusi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Setiap kecamatan di Kabupaten Magetan setidaknya memiliki satu SMA atau SMK untuk memastikan bahwa siswa di pedesaan dan perkotaan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan menengah. Sebanyak 18 kecamatan di wilayah ini memiliki sekolah negeri maupun swasta yang tersebar secara merata, sesuai dengan data dari Dinas Pendidikan Jawa Timur (2024).

Fasilitas pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah ini bertujuan mengurangi angka putus sekolah, khususnya di daerah pedesaan. Selain itu, keberadaan SMK di dekat kawasan industri atau sentra kerajinan kulit menunjukkan upaya strategis untuk menghubungkan pendidikan dengan peluang kerja lokal, memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

SMA dan SMK memiliki fokus pendidikan yang berbeda sesuai dengan tujuan utama masing-masing institusi. SMA diarahkan untuk membekali siswa dengan pengetahuan akademik sebagai dasar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kurikulum di SMA berfokus pada mata pelajaran umum seperti

matematika, sains, bahasa, dan ilmu sosial. Sebaliknya, SMK lebih mengutamakan keterampilan praktis dan vokasional yang langsung relevan dengan dunia kerja. Di Kabupaten Magetan, SMK menawarkan program keahlian yang sesuai dengan potensi lokal, seperti agribisnis, teknik mesin, pengolahan kulit, dan pariwisata. Dengan pendekatan ini, lulusan SMK diharapkan siap bekerja atau berwirausaha tanpa harus melanjutkan pendidikan tinggi. Keberadaan SMK di Magetan menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung sektor industri kreatif, khususnya kerajinan kulit dan agribisnis, yang menjadi ciri khas daerah ini. Hal ini juga mencerminkan orientasi pemerintah dalam mengintegrasikan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

Pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan SDM di Kabupaten Magetan. Lulusan SMA dan SMK tidak hanya menjadi aset bagi pembangunan daerah, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri kecil, dan pariwisata. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan produktivitas tenaga kerja, inovasi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi. SMK di Kabupaten Magetan berkontribusi langsung dalam mencetak tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Misalnya, program keahlian pengolahan kulit menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang industri kreatif, mendukung daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional. Di sisi lain, SMA mempersiapkan generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga mampu bersaing di era globalisasi.

5. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya operasional pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana ini disalurkan untuk mendukung biaya operasional sekolah, yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, pembelian alat-alat pembelajaran, serta pembayaran honor guru dan tenaga pendidik non-PNS. Dana BOS bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran pendidikan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendidikan yang berkualitas, namun demikian, pengelolaannya memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan transparan menjadi kunci utama dalam memastikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Tantangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencakup beberapa aspek, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Dengan jumlah petugas pengawas yang terbatas, beban kerja menjadi tidak seimbang, terutama jika dibandingkan

dengan banyaknya sekolah yang harus diawasi. Hal ini dapat menyebabkan pengawasan menjadi kurang optimal dan menghambat upaya untuk memastikan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan signifikan. Dalam era digital, pengawasan seharusnya didukung oleh teknologi yang memadai, seperti perangkat lunak khusus untuk pelaporan keuangan dan sistem monitoring berbasis online. Namun, kurangnya akses terhadap infrastruktur ini seringkali menghambat kelancaran pengawasan. Akibatnya, proses pengawasan masih mengandalkan metode manual yang memerlukan waktu lebih lama dan rentan terhadap kesalahan.

Tantangan lainnya adalah tingkat pemahaman yang rendah di kalangan sekolah tentang tata kelola keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Beberapa sekolah, terutama di daerah terpencil, mungkin belum sepenuhnya memahami aturan dan prosedur penggunaan dana tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh pihak terkait. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada akuntabilitas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi kendala ini, seperti peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana yang memadai, dan intensifikasi program pelatihan bagi pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah.

6. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo – Magetan

Pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang diterima oleh sekolah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Mulyasa (2011) menyatakan bahwa pengawasan dalam konteks pendidikan harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Pengawasan yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Cabang Dinas Pendidikan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi di tingkat kabupaten/kota. Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo - Magetan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerjanya.

Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo - Magetan memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan secara tepat, akuntabel, dan transparan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 menekankan pentingnya peran pengawasan oleh instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota untuk memastikan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak disalahgunakan dan digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam konteks penelitian ini merujuk pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Ponorogo-Magetan dalam pengawasan Dana BOS. Berikut adalah poin-poin pentingnya:

1. Monitoring dan Evaluasi

- a. Melakukan kunjungan rutin ke sekolah-sekolah untuk memastikan penggunaan Dana BOS sesuai dengan RKAS.
- b. Memastikan setiap sekolah memiliki laporan keuangan yang akurat dan terintegrasi.

2. Verifikasi dan Validasi

- a. Memeriksa dan menyetujui RKAS yang diajukan oleh sekolah sebelum pencairan dana.
- b. Melakukan validasi terhadap laporan pertanggungjawaban Dana BOS.

3. Bimbingan Teknis

- a. Memberikan pelatihan kepada kepala sekolah, bendahara, dan staf terkait tentang pengelolaan Dana BOS.
- b. Membantu sekolah dalam menyelesaikan kendala administratif atau teknis terkait pengelolaan Dana BOS.

4. Penguatan Transparansi

- a. Mendorong sekolah untuk melibatkan komite dan masyarakat dalam proses pengawasan.
- b. Memastikan informasi tentang penggunaan Dana BOS tersedia dan dapat diakses oleh pihak terkait.

5. Audit dan Pengawasan

- a. Melibatkan inspektorat dalam audit penggunaan Dana BOS secara berkala.
- b. Menindaklanjuti temuan audit dengan memberikan rekomendasi perbaikan.

6. Peningkatan Kapasitas Sistem

- a. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi pelaporan online, untuk mempermudah pengawasan.
- b. Menyediakan dukungan teknis bagi sekolah di daerah terpencil.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan dalam mengawasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Magetan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magetan, khususnya di beberapa sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang menerima Dana BOS. Selain itu, penelitian juga akan dilakukan di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan. Waktu penelitian berlangsung selama beberapa bulan untuk mendapatkan data yang komprehensif.

3. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup:

- A. Pegawai Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo-Magetan yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- B. Kepala sekolah dan bendahara dari SMA dan SMK di Kabupaten Magetan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

